

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada isu perdagangan, keamanan, dan teknologi saja, tetapi telah merambah hingga ke sektor pendidikan. Pada masa sekarang pendidikan bukan hanya wadah bagi pada generasi muda untuk menuntut ilmu, tetapi lebih dari itu. Pendidikan menjadi arena kontestasi kekuasaan global, di mana para pemegang kekuasaan menggunakannya untuk memperkuat pengaruh ideologis dan ilmiah mereka. Di tengah kompetisi ini, universitas-universitas elit di Amerika Serikat, seperti Harvard, menjadi pusat tarik-menarik pengaruh dan simbol keunggulan akademik Amerika. Harvard dan kampus-kampus Ivy League lainnya telah lama menjadi magnet bagi mahasiswa internasional, khususnya dari Tiongkok, yang mencari pendidikan berkualitas tinggi dan akses terhadap jaringan riset global. Mahasiswa internasional tersebut dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh kampus-kampus ternama dan dengan harapan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan relasi yang tentunya berguna di dunia kerja.

Namun, dinamika tersebut mengalami guncangan besar pada tahun 2025. Pada 4 Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani proklamasi yang membatasi visa mahasiswa asing di Harvard University, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional terkait dugaan adanya hubungan sensitif antara pihak kampus dan pemerintah Tiongkok. Proklamasi ini berimbas pada

penangguhan penerbitan visa F, M, dan J untuk mahasiswa baru, serta membuka kemungkinan pencabutan visa bagi mahasiswa internasional yang telah terdaftar di Harvard (White house, 2025). Kebijakan ini langsung ditanggapi dengan gugatan hukum oleh pihak Harvard, dan dalam waktu singkat, seorang hakim federal di Boston mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap kebijakan tersebut (Politico, 2025).

Kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut kemudian mendapatkan reaksi keras dari berbagai komunitas akademik internasional. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan politis untuk membatasi pengaruh akademik dan soft power Tiongkok di Amerika Serikat. Lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya bebas dari campur tangan politik dan merupakan arena pertukaran ide dan kolaborasi ilmiah internasional justru menjadi instrumen dalam strategi keamanan nasional dan geopolitik negara. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan gejala semakin politisnya kebijakan pendidikan di bawah tekanan rivalitas global antara dua kekuatan utama dunia (Inside Higher Ed, 2025).

Dominasi penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan tinggi global tentu tidak dapat dipisahkan dari dominasi struktural yg dijaga Amerika Serikat dalam sektor ini. Bahasa dan institusi pendidikan telah menjadi perangkat hegemonik yang menciptakan ketergantungan epistemik negara-negara lain terhadap model Barat (Altbach, 2007). Namun, dominasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir mulai mengalami pengikisan. Di mana seiring dengan meningkatnya investasi Tiongkok di sektor pendidikan, baik melalui pembangunan universitas kelas dunia, perluasan

program beasiswa internasional, maupun jumlah mahasiswa Tiongkok yang belajar di luar negeri, khususnya di Amerika. Hal tersebut tentu membuat Amerika menjadi semakin tertekan, terutama sebagai negara hegemon yang kini posisinya semakin terancam.

Yang (2003) menekankan bahwa globalisasi pendidikan tinggi telah menciptakan lanskap baru di mana negara-negara berkembang berupaya mengejar ketertinggalan mereka melalui reformasi sistem pendidikan dan peningkatan kualitas riset. Tiongkok, dalam konteks ini, tidak hanya mengejar legitimasi akademik tetapi juga berusaha membangun pengaruh struktural baru dalam ilmu pengetahuan global. Hal ini membentuk sebuah dinamika baru dalam politik pendidikan tinggi yang tidak bisa dilepaskan dari pertarungan hegemoni antara Barat dan Timur. Terutama bagi Amerika Serikat dan pesaing barunya, Tiongkok, yang menandakan bahwa lanskap poros dunia mulai mengalami percabangan. Hal ini membuat Amerika terus mencari strategi guna membendung munculnya negara adidaya baru tersebut yang mana salah satunya lewat kebijakan imigrasi.

Dalam kaitannya dengan persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan imigrasi Trump tidak bisa dipahami semata sebagai respon administratif atau kebijakan domestik, tetapi lebih sebagai tindakan hegemonik untuk mempertahankan status quo kekuasaan global Amerika. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat melihat sektor pendidikan bukan sekadar ruang sosial, tetapi sebagai medan pertarungan geopolitik. Pembatasan terhadap mahasiswa internasional, khususnya yang berasal dari Tiongkok, secara efektif membatasi peluang interaksi dan penetrasi pengaruh akademik Tiongkok di

institusi pendidikan Amerika. Terlebih, jumlah mahasiswa asing di Harvard mencapai 31% dari total populasi keseluruhan dan di mana dari total seluruh mahasiswa internasional tersebut didominasi oleh mahasiswa dari Tiongkok (Times of India, 2025). Ini sangat mencerminkan prinsip containment ala era Perang Dingin yang dulu digunakan terhadap Uni Soviet, tetapi kini diterapkan dalam ranah pendidikan dan riset.

Kebijakan tersebut pun berisiko menimbulkan kerugian besar bagi Amerika Serikat sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Postiglione (2011), universitas-universitas riset di Asia, termasuk Hong Kong University of Science and Technology, telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam kinerja akademik dan inovasi. Jika AS membatasi masuknya mahasiswa internasional, maka talenta-talenta global berpotensi dialihkan ke universitas lain di Eropa atau Asia yang lebih terbuka. Hal ini akan menurunkan daya saing akademik AS dalam jangka panjang, sekaligus mempercepat kebangkitan akademik Tiongkok yang selama ini sangat bergantung pada pelatihan luar negeri untuk membangun kapasitas domestiknya. Sebaliknya, jika mahasiswa internasional tersebut, khususnya yang berasal dari Tiongkok, tetap dan mendominasi kampus-kampus ternama di Amerika Serikat maka dapat menjadi bumerang bagi kemajuan pendidikan Amerika.

Zhao (2013) turut menyoroti bagaimana peningkatan nasionalisme di Tiongkok memengaruhi kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri, termasuk sektor pendidikan. Ketika Tiongkok merasa dibatasi di luar negeri, respons kebijakan yang mungkin diambil adalah memperkuat sistem pendidikan domestik dan meminimalisasi ketergantungan terhadap Barat. Dengan kata lain,

tindakan AS yang bertujuan membendung pengaruh Tiongkok justru bisa mendorong Tiongkok menjadi lebih mandiri dan kompetitif secara akademik dalam waktu yang lebih cepat. Hal ini menjadi semakin signifikan jika kita mempertimbangkan bahwa pendidikan tinggi telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di banyak negara. Chou dan Gornitzka (2014) menunjukkan bahwa dalam konteks Eropa, reformasi pendidikan tinggi dan penguatan universitas riset telah menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka dari itu, pembatasan terhadap mahasiswa asing, terutama dari negara strategis seperti Tiongkok, justru dapat membuat AS tertinggal dalam persaingan global untuk menarik dan mengembangkan talenta terbaik. Namun, di sisi lain tidak ada yang tahu bagaimana suatu negara, khususnya negara hegemon, berpikir dan mengeksekusi kebijakan dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat dalam membendung pengaruh Tiongkok lewat sektor pendidikan mungkin terlihat merugikan terutama bagi Amerika Serikat itu sendiri, tetapi hal tersebut mungkin menjadi cara yang paling rasional untuk diambil bagi Amerika Serikat.

Penelitian ini berangkat dari fenomena tersebut, dengan fokus pada bagaimana kebijakan imigrasi Donald Trump pada tahun 2025 mencerminkan bentuk tindakan hegemonik Amerika Serikat dalam menghadapi kebangkitan akademik Tiongkok. Dengan menjadikan Harvard sebagai studi kasus simbolik dari pertarungan kekuasaan dalam sektor pendidikan, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana kebijakan domestik seperti imigrasi bisa menjadi alat geopolitik dalam

konteks persaingan antarnegara. Dengan pendekatan konseptual terhadap hegemoni, institusi, dan containment, tulisan ini ingin memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita mengenai relasi kuasa dalam pendidikan tinggi internasional dan sektor yang tampaknya netral, namun sesungguhnya sarat dengan dimensi strategis global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di bagian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana kebijakan imigrasi Donald Trump terhadap mahasiswa internasional di Harvard merefleksikan bentuk tindakan hegemonik Amerika Serikat dalam konteks persaingan akademik dengan Tiongkok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump terhadap mahasiswa internasional di Harvard University merupakan refleksi dari bentuk tindakan hegemonik Amerika Serikat, dalam konteks persaingan akademik dengan Tiongkok. Penelitian ini secara khusus menjelaskan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap mobilitas pelajar internasional, terutama dari Tiongkok, serta menjelaskan dinamika dari persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bidang pendidikan. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tindakan Amerika Serikat melalui kebijakan tersebut sebagai bentuk strategi

hegemonik, dengan merujuk pada konsep-konsep yang dikemukakan oleh Robert Keohane dalam bukunya *After Hegemony*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana institusi pendidikan tinggi seperti Harvard menjadi sebuah alat/ instrumen kekuasaan dalam mempertahankan dominasi hegemoni Amerika Serikat melalui bidang pendidikan di tengah tantangan dari negara pesaing.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Akademik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan baik itu pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dalam hal penyusunan sebuah regulasi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Penulis mencoba membahas mengenai kebijakan imigrasi Donald Trump terhadap mahasiswa internasional, khususnya di Universitas Harvard, serta untuk menunjukkan konteks persaingan akademik global antara Amerika Serikat dan

Tiongkok. Selain itu, bagian tinjauan pustaka ini juga menjadi dasar bagi penyusunan kerangka teori dan operasionalisasi konsep dalam penelitian ini.

Sumber referensi utama dari penelitian ini berasal dari buku berjudul *After Hegemony* karya Robert keohane. Terutama dalam memahami kebijakan imigrasi Donald Trump terhadap mahasiswa internasional, pendekatan konseptual mengenai tindakan hegemonik dan peran institusi menjadi penting di sini. Keohane (1984) menyatakan bahwa meskipun hegemoni mengalami kemunduran, negara hegemon tetap mempertahankan dominasi melalui institusi yang telah dibentuknya, karena institusi-institusi tersebut mencerminkan kepentingan si hegemon dan memungkinkan kontrol pasca-hegemoni tetap berlangsung. Ia menekankan bahwa tindakan negara hegemon bukan semata-mata berdasarkan kekuatan koersif, tetapi juga dilembagakan melalui sistem dan norma internasional yang tampaknya netral, namun sesungguhnya bias terhadap kepentingan hegemonik (Keohane, 1984).

Kemudian untuk referensi kedua, penulis mengambil jurnal berjudul *Reflections on Containment* Kissinger 1994. Di dalamnya membahas mengenai konsep containment yang dijelaskan secara historis dan strategis. Kissinger mencatat bahwa kebijakan containment dirancang bukan hanya untuk menahan ekspansi militer tetapi juga ideologis dan pengaruh global dari kekuatan pesaing. Ia menunjukkan bahwa containment bersifat proaktif dalam mencegah terbentuknya tatanan dunia alternatif yang bisa menggeser dominasi hegemonik Amerika (Kissinger, 1994). Konsep ini berguna untuk memahami kebijakan pembatasan akses mahasiswa internasional, terutama dari Tiongkok, dalam kerangka ketegangan global dan akademik.

Jurnal selanjutnya berjudul *The United States, Tiongkok, and the Indo-Pacific Strategy*, karya Hu. Membahas mengenai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin nyata dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan tinggi. Hu (2020) mencatat bahwa Trump mengadopsi pendekatan “whole-of-government” untuk menghadapi kebangkitan pengaruh Tiongkok secara komprehensif, termasuk melalui kebijakan-kebijakan domestik seperti pembatasan visa dan program akademik yang strategis. Strategi Indo-Pasifik, misalnya, digunakan sebagai instrumen geopolitik untuk menekan pengaruh Tiongkok, menunjukkan bahwa dimensi akademik juga masuk dalam arena persaingan global (Hu, 2020).

Jurnal keempat berjudul *Universities and Academic Institutions: Competition and Collaboration* karya Balaram. Balaram (2010) menggarisbawahi pentingnya kompetisi antar universitas secara global, terutama dalam konteks peringkat dan citra institusi. Universitas seperti Harvard bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga simbol prestise dan kekuasaan simbolik, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara dalam menentukan siapa yang bisa mengaksesnya (Balaram, 2010). Hal ini tentunya memiliki keterkaitan dengan bagaimana pihak yang berkuasa atas hegemoni menyaring individu untuk tetap dapat bertindak di bawah pengaruhnya.

Referensi selanjutnya merupakan karya Altbach, Reisberg, dan Rumbley yang berjudul *Global Academic Revolution*. Jurnal tersebut membahas mengenai perubahan yang dialami oleh institusi pendidikan secara global, yang dilihat dari berbagai sisi. Altbach, Reisberg, dan Rumbley (2010) menyebutkan bahwa

Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan dominan dalam revolusi akademik global, namun Tiongkok mulai mengejar, terutama dari sisi kuantitas mahasiswa dan pendanaan riset. Ketimpangan ini bisa memicu kekhawatiran akan perubahan struktur kekuasaan global dalam sains dan pendidikan (Altbach et al., 2010). Jurnal tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian yang coba penulis lakukan. Dengan melihat bahwa Tiongkok mulai mengakuisisi dan mengejar perkembangan dalam hal pendidikan, tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi Amerika. Mendorong Amerika untuk mencari jalan keluar berupa strategi-strategi yang memungkinkan dirinya untuk tetap menjadi hegemon global.

Referensi terakhir terkait penelitian sebelumnya berjudul *University ranking as social exclusion* yang ditulis oleh Amsler dan Bolsmann. Jurnal ini mencoba membahas mengenai dominasi global melalui peringkat global yang menciptakan bentuk eksklusif sosial. Seperti dikemukakan oleh Amsler dan Bolsmann (2012), di mana hanya universitas tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya, jaringan, dan legitimasi global. Ini memperkuat struktur hierarki dalam sistem pendidikan internasional dan mengganggu dominasi negara hegemonik (Amsler & Bolsmann, 2012). Dengan adanya pemeringkatan universitas tersebut, negara berkembang khususnya, terpaksa untuk mendorong standar universitasnya agar dapat mencapai taraf yang diperlukan sebagai *world class university*. Sementara negara yang memiliki peringkat tinggi dalam pemeringkatan, menciptakan mekanisme yang menciptakan dan mempertahankan ketimpangan struktural dalam pendidikan tinggi internasional.

Dengan demikian, Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi terhadap mahasiswa internasional tidak bisa dipandang semata sebagai kebijakan domestik, tetapi perlu dianalisis sebagai bagian dari dinamika kekuasaan global. Negara hegemon seperti Amerika Serikat tidak hanya mempertahankan dominasi melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui kontrol atas mobilitas akademik dan penguasaan institusi pengetahuan, yang dalam konteks penelitian ini tercermin dalam kebijakan terhadap mahasiswa Internasional di Harvard University.

1.5.2 Kerangka Teori

Dalam rangka menganalisis bagaimana kebijakan imigrasi Donald Trump terhadap mahasiswa internasional di Harvard mencerminkan bentuk tindakan hegemonik Amerika Serikat dalam konteks persaingan akademik dengan Tiongkok, penelitian ini menggunakan tiga konsep utama: Tindakan hegemonik, Institusi, dan Containment. Ketiga konsep tersebut diambil dari literatur hubungan internasional dan digunakan untuk membantu dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Konsep tindakan hegemonik berakar dari karya Robert O. Keohane dalam bukunya *After Hegemony* (1984), di mana ia menjelaskan bahwa dalam sistem internasional tanpa otoritas sentral, negara hegemon tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga memanfaatkan norma dan struktur institusional untuk mempertahankan pengaruhnya. Tindakan hegemonik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai upaya sistematis dari negara dominan untuk menciptakan kondisi internasional yang menguntungkan kepentingannya, bahkan

ketika hegemon tersebut menghadapi resistensi atau keterbatasan formal. Dalam sistem internasional yang semakin terfragmentasi dan multipolar, tindakan hegemonik tidak selalu bersifat koersif. Keohane justru menekankan bahwa negara hegemon cenderung mengandalkan cara-cara institusional dan normatif untuk mempertahankan kontrol, termasuk jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat melalui kebijakan yang mempengaruhi mobilitas internasional seperti visa pendidikan. Dalam kasus kebijakan imigrasi Trump 2025, tindakan tersebut bisa dibaca sebagai bentuk intervensi hegemonik untuk menahan laju ekspansi akademik Tiongkok di wilayah yang secara historis dikuasai oleh Amerika, yakni pendidikan tinggi global. Selain itu, tindakan hegemonik yang dilakukan Amerika dalam konteks ini mencerminkan upaya untuk melindungi ranah strategis dari kontaminasi eksternal, terutama jika negara pesaing dianggap memanfaatkan kerangka akademik untuk memperluas pengaruh nasional.

Konsep kedua yang digunakan adalah *institusi*, juga dikembangkan oleh Keohane. Dalam *After Hegemony*, ia berargumen bahwa institusi internasional dan domestik bukan hanya alat pasif dari negara hegemon, tetapi juga dapat menjadi aktor yang memperkuat dominasi hegemonik melalui fungsi-fungsi normatif, regulatif, dan simbolik. Harvard, sebagai salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia, memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, ia menjadi simbol supremasi intelektual Amerika Serikat dan di sisi lain, ia juga menjadi arena di mana pengaruh asing, khususnya dari Tiongkok, mulai tumbuh melalui kehadiran mahasiswa, dosen, dan kolaborasi riset. Dalam hal ini, Harvard tidak netral secara politik,

melainkan merupakan bagian dari infrastruktur hegemonik AS yang mulai dikritisi dan dilindungi melalui kebijakan visa.

Institusi seperti Harvard juga merupakan ruang ideologis, tempat reproduksi nilai-nilai liberal, meritokrasi, dan sistem kapitalisme intelektual. Ketika jumlah mahasiswa internasional, terutama dari negara pesaing seperti Tiongkok, meningkat drastis, maka struktur simbolik hegemonik tersebut mengalami tekanan dari dalam. Maka, keputusan untuk membatasi visa ke institusi ini dapat dipahami sebagai upaya hegemon untuk merebut kembali kendali atas institusi yang dianggap sebagai "outpost of influence". Lebih lanjut, peran institusi juga penting karena dalam sistem internasional modern, banyak tindakan hegemonik tidak dilakukan langsung oleh negara, melainkan melalui "delegasi" kepada institusi yang memiliki otoritas moral atau epistemik. Dalam hal ini, kebijakan Trump yang menargetkan institusi seperti Harvard juga menunjukkan kesadaran bahwa kekuasaan Amerika Serikat sangat terkait dengan kekuasaan lembaganya, termasuk universitas sebagai pilar soft power.

Konsep *containment*, yang awalnya dipopulerkan oleh George Kennan dalam konteks menghadapi Uni Soviet, berkembang sebagai strategi politik luar negeri yang bertujuan mencegah ekspansi pengaruh negara pesaing. Henry Kissinger, dalam tulisannya *Reflections on Containment* (1994), menekankan bahwa *containment* tidak selalu bersifat militeristik. Ia bisa diwujudkan melalui tekanan diplomatik, isolasi ekonomi, atau pembatasan akses terhadap lembaga-lembaga kunci dalam sistem global (Kissinger, 1994). Dalam konteks kebijakan imigrasi 2025, strategi *containment* yang dilakukan oleh Trump dapat dibaca

sebagai bentuk containment epistemik, yakni upaya untuk membatasi akses Tiongkok terhadap jaringan pengetahuan dan simbol kekuasaan akademik global. Karena Tiongkok telah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan soft power-nya, maka pembatasan visa bagi mahasiswanya menjadi langkah preventif untuk menghambat penetrasi ideologis dan struktural di dalam sistem pendidikan tinggi AS.

Bentuk containment ini tidak memerlukan konflik terbuka, melainkan mengandalkan logika administratif, seperti pengendalian visa, batasan riset, atau bahkan pembatasan pendanaan untuk proyek-proyek kolaboratif. Semua ini mencerminkan evolusi dari containment klasik ke containment struktural, di mana sektor akademik menjadi garis depan pertahanan hegemoni global. Yang menarik, containment dalam bentuk ini juga berdampak psikologis dan simbolik. Dengan menargetkan Harvard, lembaga simbolik dominasi intelektual Amerika, kebijakan ini menegaskan bahwa bahkan institusi paling inklusif sekalipun bisa menjadi senjata geopolitik dalam konteks ancaman hegemonik. Dengan kata lain, kebijakan ini menunjukkan bahwa kontrol atas gerbang pengetahuan adalah bagian dari pertahanan nasional.

Ketiga konsep di atas, tindakan hegemonik, institusi, dan containment saling melengkapi dalam membedah penelitian kebijakan imigrasi Trump terhadap mahasiswa internasional di Harvard. Tindakan hegemonik memberikan kerangka analitis tentang bagaimana negara dominan bertindak untuk mempertahankan kekuasaannya. Konsep institusi menjelaskan peran Harvard sebagai arena dan instrumen dalam dinamika itu. Sementara containment menyoroti strategi konkret

non-militer yang digunakan untuk membatasi pengaruh pesaing seperti Tiongkok. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan visa yang tampak administratif sebenarnya menyimpan permainan para penguasa di belakangnya. Pendidikan tinggi global saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari adanya kontestasi geopolitik abad Ke-21.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Tindakan Hegemonik

Tindakan hegemonik merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dengan kekuatan terbesar di dunia (hegemon) untuk menjaga atau bahkan memperluas pengaruh dan kekuatannya di antara negara-negara lain. Negara hegemon ini tidak selalu menggunakan cara-cara yang keras seperti kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk mempertahankan dominasinya. Sebaliknya, ia sering menggunakan cara-cara yang lebih halus, seperti membentuk aturan-aturan internasional, menciptakan norma sosial, dan membangun institusi-institusi yang terlihat netral tetapi sebenarnya menguntungkan kepentingannya sendiri. Menurut pemikiran Robert Keohane (1984), inilah cara negara hegemon bertahan dalam sistem global yang tidak memiliki otoritas pusat, dengan menciptakan dan mengatur lingkungan internasional agar tetap sesuai dengan kepentingan strategisnya dalam jangka panjang. Artinya, dominasi tidak hanya terlihat dari seberapa kuat militer atau ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan sistem internasional agar tetap bekerja sesuai keinginannya, termasuk melalui lembaga pendidikan, perdagangan, dan kerja sama global lainnya.

1.6.1.2 Institusi

Dalam pandangan teori institusionalisme neoliberal yang dikembangkan oleh Keohane (1984), institusi adalah wadah atau tempat baik yang bersifat resmi seperti organisasi internasional maupun yang tidak resmi seperti kebiasaan dan norma, yang mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain. Institusi menetapkan aturan main, menciptakan standar perilaku, dan menyediakan prosedur yang membuat hubungan antarnegara menjadi lebih terstruktur dan bisa diprediksi. Namun, lebih dari sekadar alat untuk membantu kerja sama, institusi juga bisa bertindak sebagai pemain yang punya pengaruh dalam politik global. Mereka bisa menjadi panggung tempat negara-negara saling menunjukkan kekuatan, sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga atau menentang dominasi suatu negara. Dalam konteks ini, institusi seperti universitas bukan hanya tempat belajar dan meneliti, tetapi juga punya peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai dan cara pandang tertentu yang mendukung dominasi negara kuat. Misalnya, universitas top dunia seperti Harvard bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir global, menciptakan jejaring alumni internasional, dan memperkuat posisi negara asalnya dalam percaturan global. Karena itu, universitas bisa dilihat sebagai bagian dari kekuasaan yang membentuk arah dunia, khususnya dalam hal ide, inovasi, dan sumber daya manusia terlatih.

1.6.1.3 Containment

Containment adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk membatasi atau mencegah negara lain yang dianggap sebagai pesaing agar tidak semakin berpengaruh atau berkembang terlalu jauh. Yang menarik, strategi ini tidak dilakukan dengan cara-cara kasar atau langsung berperang, tetapi melalui pendekatan yang lebih halus dan tidak tampak sebagai serangan terbuka. Awalnya, konsep containment muncul pada masa Perang Dingin, ketika Amerika Serikat ingin menghentikan penyebaran pengaruh Uni Soviet tanpa harus terlibat dalam perang bersenjata. Tokoh yang dikenal dengan gagasan ini adalah George Kennan (Diplomat Amerika), dan kemudian ide ini dikembangkan lebih lanjut oleh Henry Kissinger. Ia menekankan bahwa containment bisa dilakukan dengan cara-cara non-militer, seperti memberi tekanan secara politik, membatasi hubungan ekonomi, atau bahkan melalui simbol-simbol tertentu yang menunjukkan ketidaksukaan atau penolakan terhadap negara pesaing.

Di zaman sekarang, containment tidak hanya berlaku dalam hubungan antara tentara atau senjata, tapi juga dalam hal-hal seperti pendidikan, teknologi, dan informasi. Misalnya, suatu negara bisa membatasi akses negara lain ke institusi pendidikan bergengsi, membatasi pertukaran pelajar, atau mengontrol aliran data dan kerja sama penelitian. Semua ini dilakukan agar negara pesaing tidak mendapatkan keuntungan strategis dari hal-hal yang bersifat ilmiah, sosial, atau budaya. Dengan cara ini, containment tetap bisa dilakukan meskipun tidak terlihat

seperti tindakan permusuhan, karena yang dibatasi adalah peluang dan akses, bukan wilayah atau sumber daya secara langsung.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Tindakan Hegemonik

Dalam konteks penelitian ini, tindakan hegemonik dioperasionalkan sebagai kebijakan-kebijakan konkret yang diambil oleh Amerika Serikat, khususnya di bawah pemerintahan Donald Trump pada tahun 2025, untuk mempertahankan dominasinya dalam sektor pendidikan tinggi global. Tindakan ini diwujudkan melalui kebijakan pembatasan visa mahasiswa internasional di Harvard University, yang secara langsung berdampak pada akses mahasiswa asing, terutama dari Tiongkok. Kebijakan tersebut tidak hanya dilihat sebagai langkah administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi kekuasaan yang bertujuan untuk mengendalikan siapa yang dapat mengakses institusi pendidikan elite Amerika. Melalui pembacaan terhadap proklamasi kebijakan, retorika yang digunakan pemerintah, serta respons institusional dari Harvard dan komunitas akademik, tindakan hegemonik ini dianalisis sebagai bentuk proteksi atas wilayah-wilayah simbolik dan struktural yang menjadi fondasi kekuasaan epistemik Amerika Serikat di kancah global.

1.6.2.2 Institusi

Konsep institusi dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui posisi dan fungsi Harvard University sebagai entitas akademik yang bukan hanya menjadi tempat produksi dan diseminasi pengetahuan, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan intelektual dan soft power Amerika Serikat. Harvard, sebagai salah satu

institusi pendidikan tertua dan paling bergengsi di dunia, memegang peranan sentral dalam membentuk arsitektur pendidikan tinggi global. Oleh karena itu, keterlibatan Harvard dalam kebijakan pembatasan visa menjadi signifikan dalam konteks relasi kekuasaan internasional. Operasionalisasi konsep ini mencakup pengamatan terhadap posisi global Harvard dalam pemeringkatan universitas dunia, komposisi mahasiswa internasional (terutama asal Tiongkok), serta keterlibatan institusi ini dalam kolaborasi internasional dan diplomasi akademik. Harvard tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor yang terlibat aktif dalam mempertahankan statusnya di tengah tekanan kebijakan negara dan dinamika geopolitik.

1.6.2.3 Containment

Konsep containment dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai strategi non-militer yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi ekspansi pengaruh akademik Tiongkok melalui kebijakan imigrasi. Bentuk containment ini tampak dalam kebijakan yang membatasi visa bagi mahasiswa internasional dari negara tertentu dengan alasan keamanan nasional. Dalam hal ini, Tiongkok diposisikan sebagai kekuatan asing yang pengaruhnya dianggap membahayakan stabilitas atau supremasi sistem pendidikan tinggi Amerika. Strategi ini tidak dilakukan melalui tindakan militer atau embargo terbuka, melainkan melalui mekanisme administratif seperti pengendalian visa dan selektivitas institusional. Containment dalam bentuk ini merepresentasikan evolusi strategi lama dalam konteks baru, di mana kampus alih-alih medan perang, menjadi garis depan pertahanan terhadap penetrasi epistemik dari kekuatan pesaing.

Strategi containment dalam konteks ini juga mencerminkan cara baru negara hegemon dalam mengelola ancaman yang bersifat simbolik dan intelektual, bukan sekadar fisik atau militer. Pembatasan akses ke institusi seperti Harvard tidak hanya berdampak pada individu yang ditolak visanya, tetapi juga menciptakan hambatan sistemik bagi kolaborasi riset dan pertukaran ilmu pengetahuan lintas negara. Ini memperlihatkan bagaimana kontrol atas arus mobilitas manusia dapat menjadi instrumen strategis untuk mengamankan posisi dominan dalam tata pengetahuan global. Selain itu, kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan tinggi kini diperlakukan sebagai ruang kompetisi strategis yang setara pentingnya dengan sektor ekonomi atau pertahanan. Dalam kerangka tersebut, containment bukan lagi sekadar penghalang militer, melainkan juga bentuk pertahanan atas kekuasaan simbolik dan epistemik Amerika Serikat di tengah kebangkitan akademik Tiongkok.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa kebijakan imigrasi Amerika Serikat tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, terutama pembatasan visa bagi mahasiswa internasional di Harvard University, merupakan bentuk nyata dari upaya Amerika mempertahankan dominasinya dalam dunia pendidikan tinggi. Kebijakan ini tidak bisa dianggap sekadar urusan administratif atau aturan keimigrasian biasa. Sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Amerika merasa perlu membatasi masuknya mahasiswa asing, khususnya dari Tiongkok, karena dianggap berpotensi mengganggu posisi kuat

Amerika di bidang pendidikan dan pengetahuan global. Tindakan ini menunjukkan bahwa Amerika ingin tetap menjadi pemimpin utama dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta mengatur siapa yang bisa mendapat akses ke universitas-universitas paling bergengsi di negaranya. Harvard, sebagai simbol kekuatan akademik Amerika, menjadi salah satu titik penting yang ingin dilindungi dari pengaruh negara lain yang sedang naik, seperti Tiongkok.

Melalui pandangan yang melihat universitas bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai bagian dari kekuasaan negara, kebijakan ini bisa dibaca sebagai strategi untuk membatasi pengaruh Tiongkok tanpa menggunakan cara-cara kekerasan atau militer. Strategi ini dikenal dengan nama *containment*, yaitu cara membendung pengaruh negara pesaing dengan jalan halus seperti aturan visa atau pembatasan kerja sama. Dalam hal ini, kampus seperti Harvard menjadi semacam “garis depan” dalam persaingan global, di mana siapa yang boleh belajar, meneliti, dan berkontribusi di dalamnya menjadi persoalan politik dan kekuasaan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa melalui kebijakan tersebut, Amerika sedang mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia, dan tidak segan menggunakan jalur pendidikan untuk melakukannya. Kebijakan visa menjadi bukti bahwa persaingan antara Amerika dan Tiongkok juga terjadi di ruang kelas, bukan hanya di bidang ekonomi atau militer.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksplanatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2025, serta menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut merupakan bagian dari tindakan hegemonik yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada tempat dimana peneliti memperoleh data. Dalam hal ini situs penelitian dari penulis adalah perpustakaan fisik, Perpustakaan digital, jurnal-jurnal penelitian, serta situs Web.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu bahasan baik itu manusia, benda, maupun lembaga yang mana karakteristiknya akan diteliti dalam penelitian (Husaini dan Purnomo, 2008). Pada subjek penelitian terdapat istilah objek penelitian yang merupakan fokus dari sebuah penelitian. Objek penelitian yang dikaji pada penelitian ini yaitu Kebijakan imigrasi trump terkait pelarangan mahasiswa internasional di universitas harvard.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data yang merujuk pada kata, frasa, kalimat, skema, gambar atau bagan yang berisikan hasil penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis berusaha mencari dan mendapatkan data terkait Dokumen

Kebijakan, Data Perdagangan Internasional, Laporan Institusi Internasional, Berita Artikel hingga data kontekstual pendukung seperti Teks Perjanjian Dagang Bilateral atau Regional dan Riwayat Sengketa Perdagangan. Dengan data tersebut kemudian akan digunakan untuk diolah demi keberlanjutan penelitian.

1.8.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), data primer adalah "data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli oleh peneliti melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, atau observasi" (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari situs resmi pemerintah yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh peneliti atau organisasi lain. Menurut Creswell (2014), data sekunder adalah "data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain tetapi dapat digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka" (Creswell, 2014). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang terdapat dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan database online.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen yang krusial karena digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui kondisi alamiah, sumber data primer maupun sekunder, serta berbagai metode lainnya (Sugiyono, 2010). Pada

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui literatur artikel-artikel jurnal, buku-buku, dan sumber berita dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, memeriksa, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data adalah "proses memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang dapat dipahami melalui pengkodean, pengelompokan, dan interpretasi informasi" (Miles & Huberman, 1994). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan penguraian, pengorganisasian, dan interpretasi data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen teks. Teknik ini berfokus pada memahami makna, konteks, dan pola dalam data yang kompleks. Menurut Creswell (2013), analisis data kualitatif adalah "proses yang melibatkan pengkodean data, mengidentifikasi tema atau pola, dan menyajikan hasil dalam bentuk naratif atau visual" (Creswell, 2013). Data yang dianalisis merupakan hasil dari studi pustaka yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Penulisan

a. BAB 1

Bab 1 berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Hipotesis, dan Metode Penelitian.

b. BAB 2

Bab 2 berisi gambaran umum terkait kronologi peristiwa serta penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan.

c. BAB 3

Bab 3 berisi analisis mengenai Bagaimana Kebijakan Trump khususnya dalam hal pelarangan Mahasiswa Internasional merupakan suatu bentuk tindakan hegemonik terhadap Tiongkok dalam konteksnya melalui persaingan pendidikan.

d. BAB 4

Bab 4 berisi ini kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.